

Suatu proses pembuatan strategi harus didukung oleh data yang terpercaya

REDD+ memerlukan data dalam jumlah yang besar, akurat, relevan, ~~muktahirmutakhir, lengkap, dan dapat diverifikasi~~. Data-data ini memperkuat kredibilitas proses dan hasil yang dicapai. Proses konsultasi didukung oleh data terbaru, tetapi hanya meliputi beberapa bagian Indonesia. Data yang lebih baik untuk semua daerah dan data yang sesuai dengan pengetahuan lokal para pemangku kepentingan dapat membuat proses dan hasil menjadi lebih terpercaya.

Hikmah pembelajaran nomor 5: Proses dan hasil konsultasi ditentukan oleh informasi yang mendasarinya.

Strategi REDD+ Nasional yang komprehensif memerlukan kebijakan yang terkoordinasi pada tingkat nasional

REDD+ kerap diasosiasikan dengan berbagai kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan global. Efektivitas Strategi akan meningkat secara signifikan apabila Strategi itu secara objektif mengeksplorasi kondisi hutan dan lahan secara aktual, pendorong-pendorong deforestasi dan degradasi hutan, bagaimana permasalahan yang ada pada saat ini harus diatasi, dan bagaimana mekanisme kelembagaan dan keuangan dapat mendukung pelaksanaan Strategi. Konsultasi diperkuat pada saat kelompok-kelompok kerja yang ditunjuk oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian untuk membahas REDD+ menyediakan informasi-informasi terkini mengenai kelembagaan dan keuangan. Dengan kata lain, koordinasi yang lebih baik di tingkat nasional bisa memberikan manfaat bagi pengembangan strategi.

Hikmah pembelajaran nomor 6: Konsultasi perlu didukung dengan perkembangan dan keputusan yang dibuat oleh para pemangku kepentingan yang tidak secara langsung terlibat dalam proses formulasi.

Pentingnya sistem pendukung

Keberadaan UN-REDD Programme di Indonesia sangat penting dalam proses konsultasi karena Perserikatan Bangsa-bangsa dilihat oleh banyak pihak sebagai institusi netral yang dapat mengatasi hambatan dan meningkatkan komunikasi antara berbagai sektor pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkadang berbeda pandangan. Program UN-REDD Nasional sangat membantu pemerintah Indonesia dan Bappenas untuk mengoordinasikan pekerjaan tim perumus Strategi. Bekerja sama dengan mitra-mitra, UN-REDD Programme Indonesia bisa menyatukan beragam pemangku kepentingan, terutama masyarakat adat dan komunitas lain yang bergantung pada hutan dan juga berbagai lembaga swadaya masyarakat, serta perwakilan

pemerintah. Upaya-upaya membangun dukungan luas untuk perubahan kebijakan di tengah-tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap manajemen kehutanan ini sangat dihargai.

Dengan bantuan tim penulis yang berpengalaman dan sekretariat yang efisien, proses konsultasi dikelola dengan lancar, walaupun selalu akan ada kritik dari beberapa pihak. Secara keseluruhan, dengan memberikan sistem pendukung yang solid, UN-REDD Programme Indonesia memberikan kontribusi berharga pada pengembangan Strategi Nasional REDD+ yang pertama di Indonesia.

Hikmah pembelajaran nomor 7: Proses konsultasi jelas mendapatkan manfaat dari dukungan dan fasilitasi yang diberikan oleh mitra netral yang telah disepakati bersama



UN-REDD Programme Indonesia merupakan kerja sama kemitraan antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Environment Programme (UNEP). Program ini mendukung upaya pemerintah Indonesia menurunkan kadar emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (*Deforestation and Forest Degradation*)

Programme Management Unit Office:
Manggala Wanabakti Block IV 5th Fl., Suite 525C
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta, Indonesia
Phone +62-21 570 3246, Fax: +62-21 574 6748
e-mail: info@un-redd.or.id
www.un-redd.or.id



dicetak di atas kertas daur ulang



Direktorat Jenderal Planologi
Kementerian Kehutanan

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA

Pendekatan Multipihak untuk Mengembangkan Strategi REDD+ Indonesia yang Pertama

Hikmah Pembelajaran dari Proses Konsultasi

Hasil dari Konferensi Para Pihak ke-17 (*Conference of Parties* atau COP 17) Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC) di Cancún Meksiko, tahun 2010 yang dikenal dengan nama Kesepakatan Cancún, membahas berbagai isu yang terkait dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang; termasuk peran konservasi, manajemen hutan lestari, juga peningkatan cadangan karbon kehutanan di negara-negara berkembang.

Kesepakatan Cancún juga menyebutkan persyaratan-persyaratan untuk negara-negara berkembang yang hendak melaksanakan program-program REDD+, termasuk pembuatan strategi atau rencana aksi nasional.

Indonesia telah mengambil langkah pro-aktif pada tahun 2010 dan telah memformulasikan Strategi REDD+-nya yang pertama. Prioritas besar bagi mereka yang membuat Strategi tersebut adalah memastikan bahwa berbagai pemangku kepentingan dapat memberikan pemikiran dan masukannya. Proses konsultasi berlangsung selama empat bulan dan laporan ini merupakan catatan pembelajaran selama proses tersebut.

Strategi REDD+ Indonesia dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berdasarkan

mandat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk mengembangkan Draft Strategi dengan proses yang transparan, inklusif, akuntabel dan terpercaya, Bappenas

mengundang semua kementerian dan badan terkait termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara¹ (AMAN), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Center for International Forestry Research (CIFOR), dan World Wildlife Fund (WWF).

Proses konsultasi berlangsung intensif dan cukup menantang karena terbatasnya waktu. Menjangkau para pemangku kepentingan di negara sebesar Indonesia juga mahal, menelan biaya sekitar USD350,000. Walaupun mendapat kritik, banyak pemangku kepentingan yang menghargai pendekatan yang lebih partisipatif ini, yang dianggap lebih baik dibandingkan upaya-upaya peningkatan kesadaran atau penyebaran informasi yang dahulu.

Tujuan dari tulisan ini adalah

berbagi pembelajaran-pembelajaran kunci dengan pembaca yang lebih luas agar lebih banyak orang dapat belajar dari kelebihan dan kelemahan proses ini.

¹ AMAN adalah organisasi payung untuk masyarakat adat di kepulauan Indonesia.



Rancangan
Strategi Nasional
REDD+

Revisi tanggal 18 November 2010





Pentingnya Persiapan Dini

Mekanisme persiapan penting untuk memastikan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam pembuatan Strategi REDD+. Semua informasi yang diperlukan harus diberikan sesegera mungkin, untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki waktu yang cukup untuk memahami berbagai aspek REDD+ sebelum diskusi dimulai.

Banyak pemangku kepentingan Strategi REDD+ yang memiliki akses dan kendali yang terbatas atas informasi dan proses pembuatan keputusan.

Termasuk masyarakat adat, perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Suatu proses konsultasi yang efektif harus mengantisipasi berbagai kendala budaya dan praktis yang dapat menghalangi keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk

keengganan untuk berbicara atau menyatakan pendapat di muka umum, dan pemahaman yang buruk karena keterbatasan atau ketidakjelasan informasi. Permasalahan praktis termasuk kekurangan sumber daya keuangan untuk menghadiri pertemuan konsultasi, terutama di Indonesia di mana jarak terkadang jauh dan bepergian bisa menjadi mahal.

Apabila periode konsultasi lebih panjang maka lebih banyak waktu yang akan tersedia untuk persiapan yang berharga dan diskusi Strategi REDD+ Nasional bisa jadi lebih mendalam.

Hikmah pembelajaran nomor 1: Suatu proses konsultasi yang berhasil memerlukan semua peserta betul-betul memahami isu-isu yang ada sebelum konsultasi dimulai.

Suatu proses yang inklusif memakan waktu

Proses yang inklusif penting tetapi tidak dapat dengan mudah dilaksanakan dalam jangka waktu singkat. Bappenas dan UN-REDD Programme Indonesia mencoba memberikan kesempatan yang setara untuk semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi.

Suatu proses yang inklusif berkontribusi besar pada kualitas diskusi dan juga substansi Strategi. Mungkin yang terpenting, proses inklusif memberikan rasa kepemilikan. Sayangnya proses harus dipersingkat karena tenggat waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hasilnya, ketergesaan karena tenggat waktu ini mungkin memengaruhi hasil diskusi dan menghambat kelompok-kelompok rentan untuk mencerna informasi dan berpartisipasi sepenuhnya dalam diskusi.

Hikmah pembelajaran nomor 2: Tenggat waktu yang sudah ditetapkan terlebih dahulu untuk suatu proses konsultasi dapat mengakibatkan keputusan yang prematur.

REDD+ merupakan isu yang kompleks dan perlu dikomunikasikan dengan cara yang sesuai untuk berbagai sasaran yang berbeda

Bahkan untuk pemangku kepentingan yang mendapatkan informasi memadai, REDD+ tidak mudah dipahami karena kombinasi antara proses politik dan kerumitan ilmu pengetahuan. Fasilitator konsultasi seringkali menemukan bahwa sulit untuk menghindari penggunaan istilah ilmiah yang tidak dengan mudah dipahami oleh awam. Perangkat komunikasi tambahan, menggunakan bahasa dan ilustrasi yang sesuai dapat membuat REDD+ lebih mudah dipahami. Kegagalan untuk mengembangkan komunikasi dengan sasaran yang jelas berimplikasi pada beberapa pemangku kepentingan tidak dapat mengikuti diskusi dengan baik, tidak dapat berbagi pemikiran mereka, dan tidak dapat menjadi mitra aktif dalam proses formulasi.

Hikmah pembelajaran nomor 3: Komunikasi yang efektif perlu mempertimbangkan kelompok sasaran dan memberikan informasi yang dirancang khusus untuk masing-masing kelompok pemangku kepentingan.

Partisipasi yang sesungguhnya memerlukan kepercayaan terhadap proses

Partisipasi yang sesungguhnya dalam membuat strategi harus memastikan bahwa pemangku kepentingan mempercayai bahwa kontribusi mereka didengar dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan kata lain, mereka harus percaya pada fasilitator dan proses.

Membangun kepercayaan memerlukan dorongan langsung maupun tidak langsung dan pelibatan pemangku kepentingan pada semua tingkatan pembuatan keputusan. Suatu mekanisme umpan balik yang mendokumentasikan dengan jelas masukan semua peserta juga harus tersedia. Apabila salah satunya tidak diindahkan dapat mengakibatkan peserta kehilangan ketertarikan dan rasa percaya pada proses dan pelaksanaan keputusan nantinya. Pemangku kepentingan yang merasa bahwa pemikiran dan opini mereka tidak dipertimbangkan pada proses sebelumnya juga akan enggan untuk menghadiri konsultasi.

Banyak pihak dalam diskusi menghargai bahwa pandangan dan pendapat mereka diakomodasi. Konsultasi publik di tujuh kawasan di Indonesia² dilihat sebagai suatu peningkatan dari proses pembuatan kebijakan yang terdahulu, terutama karena para pemangku kepentingan dijanjikan untuk mendapat respon tertulis mengenai status dari masukan mereka.

Hikmah pembelajaran nomor 4: Mendokumentasikan proses dan memberikan mekanisme umpan balik adalah komponen-komponen yang diperlukan untuk suatu konsultasi yang menyeluruh.

² (1) Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu dan Lampung; (2) Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan; (3) Kalimantan; (4) Sulawesi; (5) Jawa; (6) Bali, Nusa dan Kepulauan Maluku; dan (7) Papua.

